

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut BKKBN (1999), keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya (Sudiharto, 2007).

Kebutuhan dasar keluarga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam sebuah rumah tangga agar keluarga dapat mejalani kehidupan dengan baik. Kelangsungan hidup manusia ada berbagai kebutuhan yang muncul untuk mendukung aktivitas sehari-hari dari setiap anggota keluarga. Kebutuhan dasar keluarga dapat dilihat dari kebutuhan pokok /utama manusia pada umumnya. Salah satu faktor penghambat pemenuhan kebutuhan dasar keluarga yaitu faktor ekonomi dikarenakan faktor tersebut dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar keluarga yaitu memenuhi kebutuhan pokok atau dasar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Subang, pada tahun 2013 jumlah rakyat miskin mencapai 179.470 jiwa, sedangkan tahun 2014 jumlahny 185.400 jiwa. Mereka dikataka miskin pasalnya, penghasilan mereka di bawah indikator garis kemiskinan yaitu Rp 280.501 perkapita per bulan. Dari atas dapat disimpulkan bahwa

angka kemiskinan tahun 2014 meningkat dari tahun sebelumnya.

<https://news.okezone.com/read/>

Pemerintah harus lebih mengupayakan untuk pemberantasan kemiskinan. Upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan salah satunya dengan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan merupakan sebuah kata yang sering kali mempunyai arti yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena kata pemberdayaan menunjukkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang perlu ditolong karena ketidakmampuannya.

Kata pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata “*empowerment*” yang lebih menekankan pada “mengambil alih kekuasaan. Pemberdayaan juga dapat dilakukan terhadap perempuan. Keberhasilan pemberdayaan perempuan tentunya tidak dapat ditentukan secara sepihak. Ada indikator-indikator tertentu yang harus dipenuhi untuk melihat keberhasilan pemberdayaan perempuan. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut antara lain adalah membangun rasa percaya diri perempuan, membina dan mengembangkan aktivitas produktif di bidang sosial ekonomi kaum perempuan desa, dan memberdayakan kaum perempuan ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pemberdayaan perempuan disini bisa di dapatkan di salah satu program yang dikeluarkan oleh PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Oleh karena itu, sesuai amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, PKK merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dan merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.

Program PKK yang berfokus membantu dalam pemenuhan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga). Kegiatan UP2K-PKK merupakan bagian dari kegiatan POKJA II PKK yang modalnya bersumber dari Inpres bantuan pembangunan desa atau bantuan lainnya dari pemerintah, bantuan luar negeri maupun dari sawadaya masyarakat itu sendiri. Program UP2K-PKK ini diharapkan dapat dijadikan sebagai basis implementasi pemberdayaan perempuan di tingkat praktis, sehingga tercipta potensi, daya, dan karakter perempuan yang tidak kalah penting dengan laki-laki. Program UP2K-PKK merupakan salah satu program unggulan dalam tataran program jaring pengaman sosial (*social safety net*), sebagai salah satu upaya menolong masyarakat dari keterpurukan ekonomi dengan jalan memberdayakan dan membangun masyarakat menjadi individu atau keluarga yang mandiri. Adapun tujuan umum dari UP2K ini adalah membina dan mengembangkan kegiatan usaha keluarga yang tergabung dalam kelompok atau perorangan sehingga secara bertahap mampu menjadi wiraswasta serta memungkinkan timbulnya kegiatan yang bersifat koperatif. Dalam hal UP2K ini saya melakukan observasi di desa Majasari kecamatan Cibogo kabupaten Subang di daerah tersebut terdapat program UP2K untuk meningkatkan perekonomian yang dilakukan oleh ibu rumah tangga, hal itu dilakukan karena suami atau kepala keluarga tersebut dirasa kurang dapat

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena pendapatannya yang kecil, profesi para suami tersebut yaitu tukang beca, buruh tani, serta kuli serabutan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemberdayaan perempuan di desa Majasari kecamatan Cibogo kabupaten Subang?
- b. Bagaimana pemenuhan kebutuhan keluarga di desa Majasari kecamatan Cibogo kabupaten Subang?
- c. Bagaimana pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga di desa Majasari kecamatan Cibogo kabupaten Subang.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan perempuan di desa Majasari kecamatan Cibogo kabupaten Subang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan kebutuhan keluarga di desa Majasari kecamatan Cibogo kabupaten Subang
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga di desa Majasari kecamatan Cibogo kabupaten Subang

1.3.2. Kegunaan

Sejalan dengan identifikasi permasalahan tersebut, maka kegunaan penyusunan usulan penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori-teori dan konsep-konsep Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarganya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami tentang Pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pekerja sosial merupakan suatu profesi pertolongan atau pelayanan pertolongan secara profesional yang berdasarkan pada konsep kesejahteraan sosial. Selain itu, konsep kesejahteraan sosial merupakan suatu program yang terorganisir dan sistematis. Fokus utama dari kesejahteraan sosial yaitu membantu orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan cara memungkinkan orang agar dapat menjalankan fungsi sosialnya. Definisi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012: 8) sebagai berikut

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan berelasi dengan lingkungannya secara baik. Dalam pekerjaan sosial seringkali tingkatan kesejahteraan sosial dibagi menjadi (a) *social security*; (b) *social well being*; dan (c) *ideal status of welfare*.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial merupakan sebuah kondisi di mana setiap individu mampu untuk memenuhi secara baik dan maksimal kebutuhan hidupnya serta mampu menjalin hubungan-hubungan dengan lingkungannya sebagai bagian dari anggota masyarakat.

Pekerja sosial suatu bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya. Sebagai acuan, pengertian pekerjaan sosial menurut Suharto (2009:1) yang dikutip dari Zastrow, sebagai berikut:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa pekerjaan sosial melakukan proses pendampingan untuk masyarakat dalam menangani masalah-masalah serta hambatan untuk mewujudkan keberfungsian sosial mereka. Selain itu, pekerja sosial juga dituntut untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang kondusif dengan melakukan kerja sama dengan berbagai sumber untuk mencegah adanya hambatan-hambatan dalam masyarakat untuk mewujudkan keberfungsian sosial mereka.

Salah satu hambatan yang sering dihadapi masyarakat dalam mewujudkan keberfungsian sosial mereka adalah adanya masalah sosial yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat. Timbulnya masalah sosial dari dalam diri kelompok sosial yang bersumber pada faktor ekonomis, biologis, dan kebudayaan. pengertian tentang masalah sosial menurut Soetomo (2013:1) menyatakan bahwa: “Masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal itu disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku”.

Adanya profesi pekerjaan sosial tidak terlepas karena adanya Permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya dan perlu adanya penanganan yang serius untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Masalah sosial menurut Weinberg dalam Soetomo (2013:7):

Masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Dari definisi tersebut sdapat diidentifikasi tiga unsur penting, yaitu :

- 1) Suatu situasi yang dinyatakan
- 2) Warga masyarakat yang signifikan
- 3) Kebutuhan akan tindakan pemecahan masalah

Definisi tersebut menjelaskan bahwa suatu kondisi yang bisa dikategorikan sebagai suatu masalah sosial adalah ketika kondisi tersebut tidak sesuai dengan harapan, nilai, norma dan standar sosial yang telah disepakati oleh masyarakat. Ada banyak kondisi sosial yang tidak diharapkan oleh sebagian besar masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan standar sosial yang berlaku. Salah satu kondisi sosial yang tidak sesuai dengan standar sosial masyarakat dan tidak diharapkan oleh sebagian besar masyarakat adalah kemiskinan. Definisi kemiskinan dikemukakan oleh Suharto (2014: 133-134) yang dikutip dari BPS dan Depsos (2002: 4) yaitu :

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan dasar minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Definisi di atas dapat dikemukakan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi di mana individu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik dalam bentuk pangan maupun non pangan yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang didapatkan untuk membayar kebutuhan hidupnya.

Kondisi miskin dalam skala kecilnya dapat dilihat dari sebuah kemampuan keluarga dalam memenuhi standar hidup yang telah ditentukan, keluarga miskin atau pra sejahtera kerap menjadi sebuah masalah sosial yang terus di upayakan pemecahan masalahnya.

Keluarga prasejahtera/miskin adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pokok (pangan), sandang, papan, kesehatan, dan pengajaran agama. Mereka yang dikategorikan sebagai KPS adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) kriteria KS-I. (<https://www.bappenas.go.id/>).Ife (1995) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Dari penjelasan tersebut kemiskinan dapat membuat seseorang individu dalam keluarga tidak dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar merupakan suatu yang harus diupayakan oleh semua manusia, karena dengan memenuhi kebutuhan tersebut maka akan memberikan kesejahteraan kepada dirinya. Susetawan dalam Huraerah (2011:16) berpendapat bahwa kebutuhan dasar yaitu:

Kebutuhan dasar dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, ada konsumsi bahan-bahan pokok tertentu seperti pangan, sandang, papan yang dapat dijangkau setiap orang. Kedua, pelayanan pokok seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, yang setiap orang berhak untuk mempunyai akses yang sama. Ketiga, ada hak untuk berpengaruh dalam membuat dan melaksanakan program yang berpengaruh terhadap pengembangan pribadi.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa anggota keluarga pada dasarnya sangat membutuhkan ketiga konsep di atas untuk dapat memenuhi kebutuhannya dalam mencapai standar hidup dan kesejahteraan yang memadai serta lebih baik, dikarenakan setiap kebutuhan di anggap sangatlah penting dalam suatu kehidupan terutama sandang, pangan, dan papan.

Setiap individu ataupun keluarga tidak semuanya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga untuk membantu memenuhi kebutuhan dasarnya mereka harus melakukan pemberdayaan baik itu dilakukan oleh pemerintahan, swasta, maupun dari masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan menurut Soeharto (2014: 58) sebagai berikut:

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan bebas dari kesakitan; (b)menjangkau sumber-sumber produktif yang memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka

Berdasarkan penjelasan di atas pemberdayaan dapat dikemukakan kembali sebagai kemampuan individu khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber-sumber produktif dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang akan mampu mempengaruhinya.

Pemberdayaan dapat dilakukan terhadap individu, kelompok maupun masyarakat. Pemberdayaan yang menekankan pada kelompok tertentu, dalam hal ini perempuan, dapat dilakukan. Pemberdayaan perempuan menekankan pada upaya untuk dapat mengakses sumber daya serta dapat mengambil keputusan yang berhubungan dengan dirinya maupun keluarga. Tujuan dari pemberdayaan perempuan mengacu pada pertama, untuk menantang ideology patriarki, yaitu adanya dominasi laki-laki atas perempuan khususnya dalam keluarga. Kedua, mengubah struktur dan institusi yang dapat memperkuat dan melestarikan diskriminasi gender dan ketidaksamaan sosial, khususnya dalam keluarga. Ketiga, member kemungkinan bagi perempuan untuk dapat mengakses kepada dan penguasaan terhadap sumber-sumber material ataupun informasi (Sabaniah, 2009). (Mulyana & Hasanah, 2017)

Ada indikator-indikator tertentu yang harus dipenuhi untuk melihat keberhasilan pemberdayaan perempuan. Indikator-indikator pemberdayaan perempuan dikembangkan oleh Schuler, Hashemi, dan Riley (dalam Girvan, 2004) (Mulyana & Hasanah, 2017) yaitu:

1. Kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan individu dalam hal ini perempuan untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas dianggap tinggi jika individu atau perempuan mampu untuk pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas “kecil” yaitu kemampuan individu atau perempuan untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari dan kebutuhan sehari-hari untuk dirinya. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika individu tersebut dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih lagi jika perempuan tersebut dapat membeli komoditas tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas “besar” yaitu kemampuan individu atau perempuan untuk membeli barang-barang yang bersifat sekunder atau tersier, tanpa

meminta izin pasangannya dan lebih tinggi lagi jika menggunakan uang sendiri dalam membeli komoditas tersebut.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, yaitu mampu untuk membuat keputusan sendiri maupun bersama suami mengenai keputusan-keputusan keluarga.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
6. Kesadaran hukum dan politik, contohnya dapat menyebutkan para pemimpin masyarakatnya, mengetahui pentingnya mempunyai surat nikah dan hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kegiatan politik praktis
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga seperti memiliki tempat tinggal, asset produktif, tabungan.

Keberhasilan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh perempuan. Perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok. Salah satu buktinya, bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan usaha produktif rumah tangga. Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah PKK. PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan

demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam pembangunan.

Oleh karena itu, sesuai amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, PKK merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif (Maryati & Rusli).

Salah satu program pembangunan yang berpihak pada perempuan di desa adalah Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang pelaksanaannya melalui lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan pendapatan melalui kelompok usaha ekonomi produktif dalam bentuk usaha secara perseorangan maupun kelompok. Kegiatan

UP2K-PKK merupakan bagian dari kegiatan POKJA II PKK yang modalnya bersumber dari Inpres bantuan pembangunan desa atau bantuan lainnya dari pemerintah, bantuan luar negeri maupun dari swadaya masyarakat itu sendiri. Program UP2K-PKK ini diharapkan dapat dijadikan sebagai basis implementasi pemberdayaan perempuan di tingkat praktis, sehingga tercipta potensi, daya, dan karakter perempuan yang tidak kalah penting dengan laki-laki. Program UP2K-PKK merupakan salah satu program unggulan dalam tataran program jaring pengaman sosial (social safety net), sebagai salah satu upaya menolong

masyarakat dari keterpurukan ekonomi dengan jalan memberdayakan dan membangun masyarakat menjadi individu atau keluarga yang mandiri (Budiartiningsih & Gusfrianti).

1.5 Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas, peneliti menuliskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis Utama

H₀: Tidak terdapat pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga di desa Majasari kecamatan Cibogo kabupaten Subang.

H₁: Terdapat pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga di desa Majasari kecamatan Cibogo kabupaten Subang.

Sub Hipotesis:

a. **H₀:** Tidak terdapat pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga di desa Majasari Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang.

H₁: Terdapat pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga di desa Majasari kecamatan Cibogo kabupaten Subang

b. **H₀:** Tidak terdapat pengaruh pemenuhan kebutuhan dasar keluarga di Desa Majasari Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang

H₁: Terdapat pengaruh pemenuhan kebutuhan keluarga di Desa Majasari Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang

c. **H₀:** Terdapat pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga di Desa Majasari kecamatan Cibogo kabupaten Subang

H₁: Tidak terdapat pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga di Desa Majasari Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang

1.6 Definisi Operasional

1. Pemberdayaan perempuan menunjuk pada kemampuan perempuan, khususnya kelompok perempuan rentan dan lemah ibu-ibu pada kelompok UP2K di Desa Majasari Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dirinya serta keluarganya.
2. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) yang menunjang kehidupan ibu-ibu pada kelompok UP2K di Desa Majasari Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang.
3. Keluarga pra sejahtera merupakan keluarga yang dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni ibu-ibu pada kelompok UP2K di Desa Majasari Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang

Tabel 1.1

Oprasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan
-----------------	----------------	------------------	------------------------

<p>Variabel X : Pemberdayaan perempuan melalui program UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) PKK</p>	<p>1. Pengetahuan</p> <p>2. Keterampilan</p> <p>3. Kekuasaan</p>	<p>1. Pengetahuan teknis</p> <p>2. Pengetahuan non teknis</p> <p>3. Pemilihan bahan baku produk</p> <p>4. Keterampilan membuat ide</p> <p>5. Memanfaatkan fasilitas</p> <p>6. Pemanfaatan Sumber-sumber</p>	<p>1. Pengolahan pembuatan produk</p> <p>2. Bahan pembuatan produk</p> <p>3. Pembukuan produk</p> <p>4. Cara pemakaian alat produksi</p> <p>5. Cara pemasaran produk</p> <p>6. Mendapatkan bahan baku</p> <p>7. Mendapatkan bahan baku produk</p> <p>8. Strategi pemasaran produk</p> <p>9. Melihat peluang pasar</p> <p>10. Pengembangan produk</p> <p>11. Keterampilan alat yang diberikan</p> <p>12. Pelatihan yang didapatkan</p> <p>13. pemahaman dari pelatihan yang diberikan</p> <p>14. Tempat pelatihan yang diberikan</p> <p>15. manfaat pelatihan keterampilan pengolahan produk</p> <p>16. Manfaat Bimbingan dan teknis</p>
<p>Variabel Y : Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga</p>	<p>1. Kemampuan memenuhi konsumsi bahan-bahan pokok</p>	<p>1. Kebutuhan pangan</p>	<p>17. membeli sembako untuk keluarga</p>

	<p>2. kemampuan memenuhi pelayanan pokok</p>	<p>2. Kebutuhan Sandang</p> <p>3. Kebutuhan papan</p> <p>4. Kebutuhan Pendidikan</p> <p>5. Kebutuhan kesehatan</p>	<p>18. menyediakan sembako untuk bekal makan beberapa hari kedepan</p> <p>19. membeli gas LPG untuk kebutuhan memasak</p> <p>20. terpenuhi makan minimal sehari dua kali</p> <p>21. memenuhi kebutuhan gizi keluarga</p> <p>22. membeli pakaian</p> <p>23. memenuhi kebutuhan jumlah pakaian</p> <p>24. memenuhi kebutuhan kebersihan pakaian</p> <p>25. kebutuhan berpakaian untuk anak anda bersekolah</p> <p>26. layak untuk dihuni sesuai dengan anggota keluarga</p> <p>27. perlatan rumah tangga</p> <p>28. keadaan kamar mandi</p> <p>29. kebersihan di rumah</p> <p>30. memelihara kebersihan rumah</p> <p>31. membiayai anak untuk bersekolah</p> <p>32. membeli peralatan sekolah anak</p> <p>33. berobat ke dokter atau klinik</p>
--	--	--	---

	3. Kemampuan hak pengembangan diri	6. Kebutuhan air bersih 7. Kebutuhan pengakuan dari masyarakat	34. memanfaatkan fasilitas kesehatan dari pemerintah seperti BPJS 35. membeli obat dan vitamin 36. memenuhi kebutuhan air bersih 37. menggunakan air bersih 38. terbiasa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar 39. bantuan bagi lingkungan sekitar 40. bekerjasama di lingkungan sekitar 41. terlibat dalam kegiatan di lingkungan sekitar
--	------------------------------------	---	--

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat Deskriptif Analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian berupa gambaran sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang diperoleh mula-mula dikumpulkan kemudian di analisis dan di interpresentasikan guna menguji kebenaran hipotesis yang diajukan.

1.7.2 Populasi Teknik Penarikan Sampel

Populasi menurut Soehartono (2011:57) yaitu: “Jumlah keseluruhan unit analisis, atau objek yang akan diteliti”. Semakin besar sampel, akan semakin kecil kemungkinan salah menarik kesimpulan tentang populasi. Bailey (1982) berpendapat bahwa untuk penelitian yang akan menggunakan analisis data dengan statistik, besar sampel yang paling kecil adalah 30 sampel, walaupun ia juga mengakui bahwa banyak peneliliti lain menganggap bahwa sampel sebesar 100 sampel merupakan jumlah yang minimum.

Populasi pada penelitian ini adalah ibu-ibu pada kelompok UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Desa Majasari Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang sebanyak 120 orang ditarik sampel sebanyak 25% orang atau 30 orang dari jumlah populasi dan juga Ibu-ibu desa Majasari yang tidak ikut serta dalam program UP2K tersebut dengan responden berjumlah 30 orang.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*. Sampel menurut Soehartono (2011:57) yaitu: “Suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya”. Data tentang sampel adalah sebagai berikut: Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah *random sampling* dari masing-masing wilayah. *Random sampling* menurut Soehartono (2011:60) yaitu: “Cara pengambilan sampel yang dilakukan secara acak sehingga dapat dilakukan dengan cara undian atau tabel random”.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan kepada subjek peneliti. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, koran dan artikel-artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data mengenai kenyataan yang berlangsung di lapangan dengan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi non partisipan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diteliti tersebut.

2. Angket yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis diajukan langsung kepada responden, yaitu Ibu Rumah Tangga pada kelompok UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Desa Majasari kecamatan Cibogo Kabupaten Subang dan juga perempuan atau ibu-ibu yang tidak ikut serta dalam kelompok UP2K tersebut.
3. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara proses bertanya atau *interview* yang diajukan langsung kepada sumber data sekunder yang terdiri dari Kepala Desa, dan Dinas yang terkait untuk mendapatkan informasi mengenai Pemberdayaan Perempuan dalam program UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga).

1.7.4. Alat Ukur Penelitian

Alat ukur yang digunakan peneliti dalam pengujian hipotesis berupa pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman angket dengan menggunakan Skala Ordinal, yaitu skala berjenjang atau skala bentuk tingkat. Pengertian skala ordinal menurut Suhartono (2015:76), menyatakan bahwa:

Skala ordinal adalah skala pengukuran yang objek penelitiannya di kelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama ataupun berdasarkan ciri yang berbeda. Golongan-golongan atau klasifikasi dalam skala ordinal dapat dibedakan tingkatannya. Ini berarti suatu golongan diketahui lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya dari pada golongan yang lain.

Teknik pengukuran yang digunakan adalah model Likert, yaitu skala yang mempunyai nilai pengikat setiap jawaban atau tanggapan yang pernyataan yang semuanya menunjukkan keadaan terhadap suatu objek tertentu yang dapat diukur. Skala Semantic Differential bisa dengan cara membuat kategori pada setiap item pertanyaan yang diberi nilai sebagai berikut:

- a. Kategori jawaban sangat tinggi diberi nilai 5
- b. Kategori jawaban tinggi diberi nilai 4
- c. Kategori jawaban sedang diberi nilai 3

- d. Kategori jawaban rendah diberi nilai 2
- e. Kategori jawaban sangat rendah diberi nilai 1

1.7.5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu data yang diubah ke dalam angka-angka yang dituangkan dalam tabel. Untuk menguji apakah ada pengaruh antara Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, maka digunakan uji tes u-mann whitney, dengan rumus sebagai berikut:

$$U_1 = n_1 \times n_2 + \frac{(n_1 + 1)}{2} - \sum R_1$$

$$U_2 = n_1 \times n_2 + \frac{(n_2 + 1)}{2} - \sum R_2$$

Keterangan:

U = Simbol statistik yang dipakai dalam tes U-Mann Whitney

n_1 = Jumlah responden kelompok eksperimen

n_2 = Jumlah responden kelompok kontrol

R_1 = Jumlah rank kelompok eksperimen

R_2 = Jumlah rank kelompok kontrol

Pengujian statistik ini berdasarkan pada karakteristik kelompok yaitu kedua kelompok saling lepas dan keduanya memiliki skala ordinal, kemudian hasil perhitungan dari rumus U dimasukkan kedalam Z_{hitung} dengan rumus:

$$Z_{hitung} = \frac{u_{skor} - \frac{n_1 n_2}{2}}{\sqrt{\left(\frac{n_1 n_2}{N(N-1)}\right) \left(\frac{N^3 N - \sum T}{12}\right)}}$$

Dimana : $N = n_1 + n_2$

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

T = Banyaknya observasi yang berangka sama untuk semua ranking tertentu. Hasil perhitungan zhitung dibandingkan dengan ztabel dengan kriteria:

Ho = Ditolak, H1 diterima jika zhitung < Ttabel

Ho = Ditolak, H1 ditolak jika zhitung > Ttabel

1.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.8.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Majasari kecamatan Cibogo kabupaten Subang.

Adapun alasan peneliti memilih lokasih tersebut sebagai berikut:

- a. Merupakan wilayah desa pelaksanaan pemberdayaan perempuan UP2K yang dapat dikatakan sukses oleh pemerintah kabupaten Subang.

1.8.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan penulis adalah selama 5 bulan terhitung sejak bulan November 2019 sampai Juli 2020, dengan waktu kegiatan yang dijadwalkan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap pelaporan

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		2019-2020				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar
	Tahap Pra Lapangan					
1	Penjajakan					

2	Studi Literatur					
3	Penyusunan Laporan					
4	Seminar Proposal					
5	Penyusunan Pedoman Wawancara					
Tahap Pelaksanaan						
6	Pengumpulan Data					
7	Pengolahan & Analisis Data					
Tahap Penyusunan Laporan						
8	Bimbingan Penulisan					
9	Pengesahan Hasil Penelitian Akhir					
10	Sidang Laporan Akhir					